

Peran Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sebagai Upaya Resolusi Konflik Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Alma Fildzah AUFAR¹, Faishal Nur'Arafa Supandi², Salma Matla Ilpaj³, Gisela Adio Ros Maria⁴,
 Soni Akhmad Nulhaqim⁵, Muhammad Fedryansyah⁶

^{1 2 3 4 5 6}Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail Koresponden : alma18001@mail.unpad.ac.id
 faishal18002@mail.unpad.ac.id
 salma18013@mail.unpad.ac.id
 gisela18004@mail.unpad.ac.id
 soni.nulhaqim@unpad.ac.id
 m.fedryansyah@unpad.ac.id

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan lembaga yang lahir bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh perempuan. Selain itu PKK juga menjadi salah satu wadah yang mendukung perempuan dalam menjalankan peran ganda di dalam keluarga dan masyarakat, antara lain menjadi seorang ibu dan seorang pelaku pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh lembaga PKK sebagai lembaga yang mengakomodasi berbagai kegiatan kolektif sehingga memungkinkan adanya penurunan intensi konflik yang terjadi di masyarakat dan atau menciptakan kondisi lingkungan yang harmonis di masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berdasarkan konflik Agraria yang terjadi di desa tersebut. Masyarakat lokal berusaha untuk mewujudkan resolusi konflik, salah satu pihaknya yaitu dari peran PKK. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui metode analisis data sekunder dari hasil kajian literatur artikel dan jurnal yang relevan terkait peran lembaga PKK. Hasil penelitian ini merujuk kepada 10 program pokok yang dimiliki oleh lembaga PKK, meliputi: (1) penghayatan dan pengamalan Pancasila, (2) gotong royong, (3) pangan, (4) sandang, (5) perumahan dan tata laksana rumah tangga, (6) pendidikan dan keterampilan, (7) kesehatan, (8) pengembangan kehidupan koperasi, (9) kelestarian lingkungan hidup, dan (10) perencanaan sehat. Hal tersebut berpengaruh dalam penciptaan kondisi lingkungan masyarakat yang lebih baik.

Kata Kunci: konflik; PKK; Desa Genteng.

ABSTRACT

The Family Welfare Empowerment Institute (PKK) is an institution that was born for the benefit of the welfare of the community run by women. In addition, the PKK is also one of the containers that support women in carrying out dual roles in the family and society, including being a mother and an enabler. This study aims to describe the role played by PKK as an institution that accommodates various collective activities so as to allow a decrease in the intensity of conflict that occurs in the community and or create a harmonious environmental condition in the community. This research is located in Genteng Village, Sukasari Subdistrict, Sumedang Regency, West Java based on Agrarian conflicts that occurred in the village. Local communities are trying to bring about conflict resolution, one of the parties is from the PKK's role. This research was conducted by collecting data through a secondary data analysis method from the results of literature studies of relevant articles and journals related to the role of PKK institutions.

The results of this study refer to 10 main programs owned by PKK institutions, including: (1) the perception and practice of Pancasila, (2) gotong royong, (3) food, (4) clothing, (5) housing and household governance, (6) education and skills, (7) health, (8) cooperative life development, (9) environmental sustainability, and (10) healthy planning. This is influential in creating better community environment conditions.

Keywords: *conflict; PKK; Genteng Village.*

PENDAHULUAN

Manusia dalam bermasyarakat tidak bisa lepas dari suatu konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan dan kemajemukan dalam masyarakat (Rosana, 2015). Perbedaan dalam masyarakat lazim terjadi dan dapat menjadi potensi dan bernilai positif apabila dipahami dan dikelola secara konstruktif dan bijaksana. Sedangkan konflik dapat menjadi sebuah permasalahan baru apabila diselesaikan dengan tindakan represif yang merugikan banyak pihak termasuk masyarakat itu sendiri (Wahab, 2014). Konflik mungkin terjadi pada seluruh lapisan masyarakat akibat adanya perbedaan pendapat, pandangan, kepentingan, agama, politik, dan lain sebagainya (Irwandi, 2017).

Salah satu konflik yang umum terjadi, yaitu konflik agraria yang melibatkan petani dan Perum perhutani di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Konflik ini bermula dari Perum Perhutani yang berusaha merebut lahan yang sedang digarap oleh petani yang akan digunakan sebagai lahan konservasi hutan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian hutan (Adiansah et al., 2019).

Berdasarkan penelitian (Nulhaqim et al., 2019) penyebab dari adanya konflik agraria atau pemanfaatan lahan yang terjadi di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang yaitu 1) pengelolaan air PDAM di tahun 2018, adanya PDAM membuat masyarakat kehilangan kontrol dalam menggunakan air sehingga terjadinya kekeringan dan hanya dapat disalurkan ke 700 jiwa di dusun Cisitu dan hanya mengairi kurang lebih 20 hektar lahan pertanian dari 280 hektar. 2) potensi kehilangan pekerjaan, permasalahan yang terjadi mengenai sumber air menimbulkan adanya perubahan pola pertanian, yang memungkinkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya dan ditambah dengan rata-rata

tingkat pendidikan masyarakat yang rendah semakin menyulitkan masyarakat mendapat pekerjaan. 3) permasalahan lahan, adanya konflik mengenai perbedaan kepentingan lahan antara petani dan Perum Perhutani. Konflik ini terjadi pada berbagai sistem yaitu sistem mikro, mezzo dan makro. 4) kemiskinan, masyarakat Desa Genteng memiliki mata pencaharian rata-rata petani dan buruh, keterbatasan ekonomi membuat sedikitnya 500 kepala keluarga di Desa Genteng belum teraliri oleh listrik. 5) kesadaran dalam pelestarian lingkungan, kurang adanya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat. dan 6) permasalahan sulitnya memasarkan hasil pertanian, dengan kendala pada kemasan produk.

Berdasarkan kajian konflik, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di masyarakat yaitu disebut dengan resolusi konflik. Upaya resolusi konflik sejauh ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi. Pendekatan litigasi dalam resolusi konflik merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui proses beracara di pengadilan sehingga hakim yang memiliki wewenang untuk mengatur dan memutuskan (Lathif & Habibaty, 2019). Berbeda dari litigasi, pendekatan non litigasi atau juga dikenal sebagai istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan kegiatan resolusi konflik yang dilakukan di luar pengadilan yang dapat dilakukan dengan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi (Nulhaqim et al., 2017)

Upaya resolusi konflik dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang menawarkan pemenuhan kebutuhan pada saat ini dengan tidak mengurangi kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya resolusi konflik didalamnya mengandung dua gagasan penting, yaitu (1) gagasan kebutuhan

Peran Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sebagai Upaya Resolusi Konflik Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Jawa Barat

The Role Of Family Welfare Empowerment Institutions (PKK) As A Conflict Resolution Effort In Genteng Village, Sukasari District, Sumedang Regency, West Java

(Alma Fildzah AUFAR, Faishal Nur'arafa SUPANDI, Salma Matla IIPAJ, Gisela Adio ROS MARIA, Soni Akhmad NULHAQIM, Muhammad Fedryansyah)

yang mencakup kebutuhan mendasar kaum miskin sedunia sebagai prioritas dan (2) gagasan keterbatasan yang berakar pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan komunitas atau lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pada saat ini dan masa yang akan datang (Brundtland, 1987).

Resolusi konflik dapat berbeda antara konflik dari masyarakat yang satu dengan konflik yang terjadi di masyarakat lainnya tergantung dari bagaimana kebutuhan dari penyelesaian konflik tersebut sesuai dengan masyarakatnya. Konflik dapat diselesaikan dengan beberapa upaya, dalam UU pasal 7 menyebutkan bahwa musyawarah hingga mencapai mufakat dengan menghormati norma agama, kesusilaan, adat, dan ketentuan undang-undang dapat menjadi solusi, serta melibatkan peran dari tokoh agama, tokoh adat, dan unsur masyarakat. Berdasarkan hal tersebut lembaga yang ada di desa Genteng juga memiliki potensi untuk menjadi salah satu penggerak dalam upaya resolusi konflik. Salah satu lembaga yang dapat dilihat perannya yaitu lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK.

PKK merupakan lembaga kemasyarakatan yang terdapat di desa sebagai penggerak partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pembangunan, dan berperan dalam berbagai kegiatan pertumbuhan desa (Ramadani, 2020). Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran lembaga PKK dapat menjadi media resolusi konflik.

METODE

Penelitian yang berjudul Peran Lembaga Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sebagai Upaya Resolusi Konflik di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Jawa Barat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui metode analisis data sekunder dari hasil kajian literatur artikel dan jurnal yang relevan terkait peran lembaga PKK. Analisis dilakukan merujuk kepada program pokok yang dimiliki oleh lembaga PKK. Hal tersebut berpengaruh dalam penciptaan kondisi lingkungan masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Genteng

Desa Genteng merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah utara Gunung Manglayang di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Kondisi geografis Desa Genteng yang berdekatan dengan gunung membuat masyarakat bermata pencaharian utama sebagai petani sawah, petani kebun, dan peternak (Adiansah et al., 2019). Desa Genteng yang berlokasi di lereng perbukitan dengan ketinggian tempat di atas 1000 m dpl ini menjadi wilayah pertanian yang cocok ditanami berbagai jenis sayuran seperti tomat, kubis, cabai merah, bawang daun, dan kentang (Hidayat et al., 2018). Selain itu wilayah ini pula ditanami padi pada sekitar aliran sungai dan air irigasi. Lahan pertanian di Desa Genteng seluas 1300 Ha dengan rincian 314 Ha sawah, 354 Ha lahan pemukiman, 282 Ha ladang, 300 Ha tanah hutan negara, dan 50 Ha lain-lain.

Pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Genteng yaitu petani dan buruh tani, namun selain itu terdapat masyarakat yang bekerja sebagai PNS, pedagang, dan pegawai swasta (Hidayat et al., 2018). Dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat, keadaan sosial ekonomi di Desa Genteng dapat dikatakan rendah, karena seluruh petani belum memiliki lahan garapan sendiri, masih menyewa kepada yang lain. Serta terdapat 325 orang yang belum memiliki pekerjaan.

Konsep Konflik

Definisi Konflik

Konflik merupakan sebuah proses yang muncul akibat adanya persepsi oleh satu pihak yang mempengaruhi pihak lainnya dalam konotasi negatif yang menjadi akar dari sebuah konflik. Konflik tersebut dapat menyebabkan adanya ketidakharmonisan tujuan dan pemahaman terhadap sesuatu sehingga muncul ketidaksepakatan antara kedua pihak yang berselisih (Robbins, 2008).

Konflik dapat didefinisikan sebagai perjuangan atau usaha untuk mendapatkan hal yang jarang ataupun langka, antara lain nilai, status, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tujuan dari konflik itu sendiri tidak hanya mendapatkan keuntungan tersebut melainkan untuk

menaklukkan rival atau pesaingnya. Selain itu, konflik memiliki arti, yaitu sebagai bentrokan kekuatan dan kepentingan antara dua pihak yang berkepentingan sebagai proses perebutan sumber-sumber yang terdapat di masyarakat, seperti sumber ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terbatas (Lawang, 1994).

Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu upaya penanganan konflik (Adiansah et al., 2020). Resolusi konflik merupakan aktivitas penyepakatan perjanjian dan kesepakatan baru untuk mengurangi atau bahkan menyelesaikan konflik yang terjadi agar pihak-pihak yang terlibat dapat saling menerima perselisihan dan ketidakcocokan yang ada (Irwandi, 2017). Secara sederhana, resolusi konflik juga diartikan sebagai upaya yang bertujuan untuk menghentikan konflik dengan cara analitik dan mengenai akar masalah penyebab konflik dengan tujuan untuk membangun hubungan baru yang lebih baik yaitu bersifat positif dan bertahan lama di antara pihak yang berkonflik (Burton dalam Abdel, 2004; Fisher et al., 2001)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Definisi PKK

Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 pasal 1 menyatakan bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang disingkat menjadi PKK merupakan sebuah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan agar terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlaq mulia serta berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan (Wati, 2015).

Didefinisikan pula bahwa PKK merupakan sebuah sarana atau wadah bagi pembinaan masyarakat dan keluarga, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Wadah ini bertujuan untuk memberikan sinergi untuk menghasilkan keluarga sejahtera yang mandiri dengan cara meningkatkan mental spiritualitas perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila (Sutedjo, 2006).

PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan suatu komunitas yang bergerak dari masyarakat yang lahir karena kebutuhan masyarakat. PKK sendiri memiliki tim yang terdapat dari tingkatan pusat sampai dengan tingkat kelurahan desa serta terdapat kelompok-kelompok kerja (Saleha et al., 2016)

Peran PKK

Dalam kehidupan masyarakat, PKK berperan melaksanakan kegiatan keterampilan yang cukup beragam seperti pola hidup sehat, pendidikan keluarga yang dimulai dari lingkungan terendah yaitu Rumah Tangga (RT) hingga Desa dan Kelurahan (Wati, 2015). PKK berperan pula dalam upaya pengembangan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program-program yang dijalankan, sehingga PKK menjadi agen yang penting untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat khususnya kaum perempuan (Rantung et al., 2018).

Peranan lainnya sejalan dengan visi dan misi PKK yaitu sebagai berikut:

Visi, terwujudnya keluarga yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin. Dan misi, 1) meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan Pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender; 2) meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi; 3) meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan sehat dan layak huni; 4) meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat; 5) meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK yang meliputi kegiatan pengorganisasian dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Sasaran PKK

Sasaran dari gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah keluarga, baik keluarga di pedesaan maupun keluarga di perkotaan yang perlu untuk ditingkatkan dan dikembangkan kepribadiannya dalam bidang :

Mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku manusia sebagai insan hamba tuhan, warga negara, anggota masyarakat serta

Peran Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sebagai Upaya Resolusi Konflik Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Jawa Barat

The Role Of Family Welfare Empowerment Institutions (PKK) As A Conflict Resolution Effort In Genteng Village, Sukasari District, Sumedang Regency, West Java

(Alma Fildzah AUFAR, Faishal Nur'arafa SUPANDI, Salma Matla IIPAJ, Gisela Adio Ros Maria, Soni Akhmad NULHAQIM, Muhammad Fedryansyah)

bermanfaat berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Fisik material, meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, kesempatan kerja, lingkungan hidup yang layak sehat, lestari dengan peningkatan melalui pendidikan, pengetahuan dan keterampilan (Kadma, 2017)

Upaya Resolusi Konflik melalui Peran PKK di Desa Genteng

Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Genteng juga mengupayakan 10 program pokok PKK nasional yaitu:

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Gotong Royong
Pangan
Sandang
Perumahan dan Tatalaksana Rumah

Tangga

Pendidikan dan Keterampilan
Kesehatan
Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
Kelestarian Lingkungan Hidup
Perencanaan Sehat

Dari banyaknya program atau peran yang dapat dimaksimalkan oleh PPK dalam lingkup masyarakat membuat PKK mengemban peran yang cukup besar dalam menciptakan lingkungan yang harmonis atau bahkan menjadi salah satu upaya resolusi konflik yang terjadi di desa Genteng tersebut. Memang sampai saat ini, PKK di Desa Genteng belum memiliki kapasitas yang penuh untuk menjalankan keseluruhan tugas pokok tersebut dalam upaya resolusi konflik yang diungkapkan dengan beberapa hambatannya tetapi sudah semaksimal mungkin dapat berperan aktif terutama dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Hal ini dapat ditunjukkan dengan program pokok nomor 2 yaitu gotong royong, adanya interaksi antar masyarakat yang baik dalam bentuk kerja bakti tau kegiatan lain dapat menurunkan konflik kecil antara masyarakat contohnya konflik antar tetangga, selain itu gotong royong menjadi wadah untuk bertegur sapa dan menimbulkan kedekatan tertentu baik itu kedekatan geografis, demografis, hingga kedekatan emosional.

Mitra kerja PKK dengan internal desa seperti bidan (kader posyandu), tambulkan

(bidang pertanian) dan MUI (bidang agama) membuat PKK juga tidak hanya dapat melakukan tugas tersebut secara mandiri tetapi dapat berkolaborasi dengan masyarakat maupun dari mitra kerja yang lain. Upaya penciptaan lingkungan yang harmonis ini pula dapat diwujudkan dengan kegiatan rutin PKK yaitu pengajian, posyandu, dan kegiatan kesejahteraan masyarakat lainnya.

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang disebabkan oleh beberapa penyebab, yaitu: 1) pengelolaan air PDAM di tahun 2018, 2) kehilangan pekerjaan, 3) permasalahan lahan, 4) kemiskinan, 5) kesadaran dalam pelestarian lingkungan, 6) sulitnya memasarkan hasil pertanian. Resolusi konflik menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik di Desa Genteng. Konflik dapat diselesaikan dengan salah satu upaya yang sesuai dengan UU pasal 7. Berdasarkan UU pasal 7, salah satu lembaga yang berperan menyelesaikan konflik di Desa Genteng adalah lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Lembaga PKK memiliki program pokok yang diciptakan untuk membat kondisi lingkungan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. PKK Desa Genteng turut mengupayakan 10 program pokok PKK Nasional. Dari sekian banyak program dan peran PKK ini dapat menjadi salah satu upaya resolusi konflik yang terjadi di Desa Genteng untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.

Berdasarkan hasil kajian literatur mengenai peran dan program PKK dalam resolusi konflik di Desa Genteng. Sampai saat ini, PKK Desa Genteng belum memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan untuk menjalankan keseluruhan tugas dalam upaya resolusi konflik karena beberapa hambatan. Akan tetapi, PKK Desa Genteng sudah semaksimal mungkin berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis melalui gotong royong dengan tujuan menurunkan konflik kecil antar masyarakat seperti konflik antar tetangga. Selain itu PKK Desa genteng memilki kegiatan rutin seperti pengajian, posyandu, dan kegiatan

Peran Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sebagai Upaya Resolusi Konflik Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Jawa Barat

The Role Of Family Welfare Empowerment Institutions (PKK) As A Conflict Resolution Effort In Genteng Village, Sukasari District, Sumedang Regency, West Java

(Alma Fildzah AUFAR, Faishal Nur'arafa Supandi, Salma Matla Ilpaj, Gisela Adio Ros Maria, Soni Akhmad Nulhaqim, Muhammad Fedryansyah)

kesejahteraan masyarakat lainnya sebagai upaya menciptakan lingkungan yang harmonis di Desa Genteng.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Resolusi Konflik*, 1, 1-10.
- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2020). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Share: Social Work Jurnal*, 10, 163-174. 10.24198/share.v10i2.31200
- Brundtland, G. H. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. The United Nation.
- Fisher, S., Abdi, D., Ludin, J., Smith, R., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council.
- Hidayat, Y., Dewi, V. K., & Danar Dono, S. R. (2018). Pengembangan pertanian Ramah Lingkungan Di Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 7.
- Irwandi, E. R. C. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. *JISPO*, 7.
- Kadma, H. O. (2017). PERAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN BUKUAN KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 969-978.
- Lathif, A., & Habibaty, D. M. (2019). Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16, 76-88.
- Lawang, R. (1994). *Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Universitas Terbuka.
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Hidayat, E. N. (2019). Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 1.
- Nulhaqim, S. A., Irfan, M., Diana, H., & Jatnika, D. C. (2017). Konflik Sosial di Kampung Nelayan (Studi Kasus di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat). *Jurnal Sosio Konsepsia*, 6, 197-209. doi:10.33007/ska.v6i2.677
- Ramadani, D. M. (2020). Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Mukti Jaya kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Rantung, J. F., Mandey, J., & Londa, V. Y. (2018). Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa (Suatu Studi Kasus di Desa Ongkau I Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi*.
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Rosana, E. (2015). Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, X, 216-230.
- Saleha, R., E, L., & M, A. (2016). PEMBERDAYAAN KADER PKK DALAM USAHA PENYEBARLUASAN INFORMASI KESEHATAN JATINANGOR. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 5(1), 5-8.
- Sutedjo, A. (2006). *Mengenal Penyakit Melalui Pemeriksaan Laboratorium*. Amara Books.
- Wahab, A. J. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Elex Media Komputindo.

Peran Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sebagai Upaya Resolusi Konflik Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Jawa Barat

The Role Of Family Welfare Empowerment Institutions (PKK) As A Conflict Resolution Effort In Genteng Village, Sukasari District, Sumedang Regency, West Java

(Alma Fildzah AUFAR, Faishal Nur'arafa Supandi, Salma Matla Ilpaj, Gisela Adio Ros Maria, Soni Akhmad Nulhaqim, Muhammad Fedryansyah)

Wati, I. (2015). Peranan PKK dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung. *Jurnal Kultur Demokrasi*.

Peran Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sebagai Upaya Resolusi Konflik Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Jawa Barat
The Role Of Family Welfare Empowerment Institutions (PKK) As A Conflict Resolution Effort In Genteng Village, Sukasari District, Sumedang Regency, West Java
(Alma Fildzah Aufar, Faishal Nur'arafa Supandi, Salma Matla Ilpaj, Gisela Adio Ros Maria, Soni Akhmad Nulhaqim, Muhammad Fedryansyah)